

BAB 5

SARAN

1. Perlu adanya penambahan tenaga kefarmasian di ruang farmasi puskesmas induk dan puskesmas pembantu agar jumlahnya sebanding dengan jumlah pasien yang dilayani dan tidak memakan waktu yang lama.
2. Sebaiknya sistem antrian pada SIMPUS di buat lebih tertata sehingga petugas farmasi tahu yang mana resep yang duluan masuk dan yang baru masuk, agar pasien tidak salah paham dengan pasien yang lain.
3. Sebaiknya diberikan ruang khusus untuk konseling di ruang farmasi agar privasi pasien terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

BNF, 2022, British National Formulary 83th edition, London: Pharmaceutical Press.

Kementrian Kesehatan RI. 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas, Jakarta.

Lacy, C.F., Armstrong, L.L., Goldman, M.P., Lance, L.L., 2009. Drug Information Handbook: A Comprehensive Resource for All Clinicians and Healthcare Professionals, 17th ed. Lexi-Comp, Inc., Ohio.

McEvoy, G.K., 2011, AHFS Drug Information, American Society of Health System Pharmacists, Maryland.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Kemenkes RI, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tentang Puskesmas, Kemenkes RI, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2019, Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas, Kemenkes RI, Jakarta.

Presiden Republik Indonesia, 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tentang Kesehatan, Jakarta.

Sweetman, S.C., 2009, Martindale: The Complete Drug Reference 36th ed., Pharmaceutical Press, London.

Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.